



Judul : Sufmi Dasco sah jadi guru besar ilmu hukum
Tanggal : Jumat, 02 Desember 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Orasi Bertajuk Pemilu Demokratis Sufmi Dasco Sah Jadi Guru Besar Ilmu Hukum

WAKIL. Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-14 Universitas Pakuan di Bidang Ilmu Hukum. Acara pengukuhan digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Prosesi pengukuhan dipimpin langsung Rektor Universitas Pakuan Prof Didik Notosudjono melalui sidang senat terbuka Universitas Pakuan. Hadir sejumlah tokoh nasional dalam sidang senat terbuka ini. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, hingga Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Dalam kesempatan itu, Dasco menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul "Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat".

Dasco mengatakan, pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Upaya untuk mendapatkan 'mandat rakyat' harus melalui sebuah pemilu yang jujur, adil, serta beradab.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak ditentukan oleh rakyat, baik langsung maupun melalui rakyat. Hal ini merupakan sarana partisipasi politik bagi masyarakat.

"Model demokrasi ini mensyaratkan adanya sistem partisipasi politik yang memberi peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi secara efektif, dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik," ujar Dasco dalam pidatonya di SICC, Bogor, kemarin.

Dasco mengatakan, kedaulatan rakyat mengartikan rakyat memiliki kuasa tertinggi dalam suatu negara. Maka dari itu, rakyat sendirilah yang menentukan corak dan tujuan pemerintahan lewat wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu.

"Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri

oleh rakyat. Mekanismenya melalui pemilihan umum. Pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politik rakyat bagi penyelenggaraan negara," tutur Dasco.

Dasco menjelaskan, pelaksanaan pemilu berlangsung demokratis bila menghadirkan dua aspek yakni aspek prosedural dan aspek substantif.

Aspek prosedural meliputi UU Pemilu, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, peserta pemilu yakni partai politik atau calon perseorangan, daftar pemilih tetap dalam pemilu.

Sementara aspek substantif, meliputi pemilu yang sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif, serta menganut azas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Indikator dari aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan suara pemilih.

Dasco menuturkan, prinsip kehidupan negara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak berpartisipasi aktif dalam proses politik. Masyarakat yang demokratis merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat ini hanya mungkin berjalan maksimal jika masyarakat memiliki kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipatif. Intinya, partisipasi politik masyarakat merupakan 'jantung' demokrasi.

Dalam gagasan tentang demokrasi, maka setidaknya suatu sistem politik demokratis ditentukan oleh tingkat partisipasi politik warganya. Sementara dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal.

"Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis," sambungnya.

Rektor Universitas Pakuan Didik Notosudjono mengucapkan selamat kepada Dasco. "Kualitas SDM di Universitas Pakuan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi," katanya.

Didik menambahkan, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, Keilmuan, Silih Asih, Silih Asuh dan Silih Asuh, Universitas Pakuan turut serta dalam pembangunan nasional dan daerah. ■ KAL